

## **BAB IV**

### **PERAN CHINA SEBAGAI PENDORONG INSTITUSIONALISASI KERJASAMA ASEAN PLUS THREE MELALUI ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)**

Dalam bab keempat yang merupakan bab analisa, penulis akan menjelaskan tentang peran yang dilakukan negara China dalam kerjasama ASEAN Plus Three adalah sebagai pendorong institusionalisasi kerjasama ASEAN Plus Three melalui ASEAN-China Free Trade Area atau disebut juga dengan ACFTA. Bab keempat ini terbagi menjadi 3 sub bab yaitu, pertama mengenai penjelasan bahwa China berperan sebagai inisiator dalam pembentukan kerjasama ACFTA, dimana China memberikan gagasan-gagasan agar dibentuknya suatu kerjasama perdagangan bebas antara ASEAN dan China. Kedua, penjelasan tentang diresmikannya kerjasama perdagangan bebas antara ASEAN dan China melalui penandatanganan kesepakatan kerjasama ACFTA. Ketiga, dijelaskan pula bahwa China berperan sebagai pelaksana dalam kerjasama ACFTA. Dari penjelasan bab keempat ini diharapkan pembaca dapat mengetahui seberapa besar peran yang dilakukan negara China dalam keanggotaan ASEAN Plus Three.

#### **A. China Sebagai Inisiator Dalam Pembentukan Kerjasama ACFTA**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “China berperan sebagai pendorong institusionalisasi pasar bebas dalam ASEAN Plus Three” bukan berarti bahwa China merupakan satu-satunya pencetus dilaksanakannya pasar

bebas di dunia ini. Karena pasar bebas itu sendiri sebenarnya sudah dicanangkan oleh APEC pada tahun 1994 dalam salah satu KTT APEC di Bogor, Indonesia. Menjadi pendorong institusionalisasi berarti bahwa China berperan sebagai kekuatan pendorong untuk lebih memantapkan kesiapan negara-negara ASEAN Plus Three dalam menghadapi pasar bebas serta mendorong dilaksanakannya pasar bebas di lingkungan internal ASEAN Plus Three.

ASEAN Plus Three, sesuai dengan yang tercantum dalam *East Asian Cooperation* adalah suatu forum kerjasama yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Timur serta untuk memperkuat kerjasama Asia Timur di berbagai bidang dalam menjawab tantangan pada abad ke-21. Salah satu tantangan tersebut adalah globalisasi dan pasar bebas (*free trade*) yang telah dicanangkan dalam KTT APEC. Dimana dalam pasar bebas ini para pengusaha di setiap negara dituntut untuk lebih memiliki kesiapan dan bahkan spesialisasi dalam melakukan perdagangan dengan negara lain tanpa harus mendapat campur tangan dari pemerintah. Bahkan pemerintah pun tidak boleh menarik keuntungan yang terlalu besar dari perdagangan antar negara tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa hanya dengan kemampuan pengusaha dan kualitas barangnya sajalah yang menentukan laku atau tidaknya barang yang akan dijual ke negara lain.

Disini China berperan dalam proses institusionalisasi pasar bebas itu sendiri. Artinya adalah bahwa China berperan dalam mendorong, membantu

dan mempersiapkan semua anggota ASEAN Plus Three agar mampu dan lebih siap untuk menghadapi pasar bebas. Salah satu usaha China tersebut antara lain adalah dengan mengadakan perjanjian pasar bebas baik secara bilateral dengan negara-negara ASEAN Plus Three, maupun dalam institusi ASEAN Plus Three.

Negara-negara anggota ASEAN merupakan negara-negara yang sedang berkembang, namun tetap dinilai penting bagi perekonomian China. Permasalahan ekonomi dan perdagangan yang terjadi di kawasan itu akan berpengaruh pula bagi kondisi perekonomian China, baik itu kecil maupun besar atau langsung maupun tak langsung. Karena harus diakui oleh China bahwa ASEAN merupakan pasar yang potensial bagi barang-barang produksi yang berasal dari China, selain itu kebutuhan bahan dasar industrinya serta sumber daya alam lain yang dibutuhkan masyarakat China juga berasal dari negara-negara di kawasan tersebut. Sehingga, bisa dikatakan bahwa sifat hubungan antara China dengan negara-negara ASEAN merupakan hubungan saling ketergantungan dan juga saling menguntungkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perasaan saling ketergantungan dan saling menguntungkan juga merupakan salah satu sebab dari masuknya China ke dalam forum kerjasama ASEAN Plus Three. Keikutsertaan China ini ternyata mendapat sambutan yang cukup baik dari negara-negara anggota lainnya. Penyambutan keputusan China untuk menjadi anggota ASEAN Plus Three ini dikarenakan pada dasarnya hanya ada beberapa anggota saja yang benar-benar telah siap dalam menghadapi pasar bebas. Sedangkan sebagian besar negara

lainnya ternyata masih belum memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi pasar bebas. Bahkan ada juga beberapa negara yang meskipun secara tidak resmi menolak pasar bebas, namun penolakan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari negara tersebut, karena menurut mereka pasar bebas hanya akan menguntungkan para pengusaha kaya serta negara-negara besar saja. Mereka umumnya melakukan demonstrasi besar-besaran pada momen-momen tertentu untuk menolak globalisasi dan pasar bebas.

Kerjasama ekonomi dan perdagangan ASEAN semakin mengalami pertumbuhan yang pesat terutama sejak masuknya China dalam kerjasama ASEAN Plus Three. Keputusan untuk menciptakan kerjasama perdagangan bebas di antara semua negara Asia Tenggara dan China mulai muncul sebagai tanggapan terhadap usulan yang diajukan oleh perdana menteri China pada waktu itu, Zhu Rongji, dalam *ASEAN Plus Three Meeting* di Singapura pada bulan November tahun 2000. Usulan serupa juga dikemukakan oleh pemerintah Singapura, sementara negara-negara ASEAN lainnya menentang pembentukan ASEAN-China FTA (*Free Trade Area*) tersebut. Mereka cenderung lebih mendukung pembentukan FTA yang mencakup wilayah yang lebih luas termasuk Jepang dan Korea Selatan. Namun kedua negara tersebut pada saat itu belum siap.

setahun kemudian pada tahun 2001 dalam *ASEAN-China Summit* di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. China mengusulkan adanya perdagangan bebas antara ASEAN dan China. Pada waktu itu China mengusulkan suatu kawasan perdagangan bebas dengan ASEAN dalam

konsep *The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*, yang ditargetkan akan terwujud pada tahun 2010. *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif maupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para anggota ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Apabila ACFTA dapat diberlakukan dengan lancar, maka hambatan tarif dan non-tarif akan dicabut dari semua negara ASEAN.<sup>26</sup> Perdana Menteri Zhu menekankan pentingnya bagi ASEAN dan China untuk fokus terhadap bentuk-bentuk kerjasama, serta berusaha untuk mempromosikan pembentukan ACFTA.

#### **B. Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama Antara ASEAN dan China Dalam ACFTA**

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa pada abad ke-21 ini merupakan abad dengan tantangan ekonomi global yang semakin berat. Hampir semua Negara di dunia melakukan penandatanganan perjanjian liberalisasi perdagangan dan pasar bebas, baik itu pada tingkat regional maupun pada tingkat global. Dengan melakukan penandatanganan perjanjian

---

<sup>26</sup> [www.cafta.org.cn/](http://www.cafta.org.cn/). Akses 30 September 2011.

tersebut diharapkan setiap Negara sudah siap untuk menghadapi berbagai konsekuensi dan dampak yang terjadi akibat dari pasar bebas itu sendiri.

Pada bulan November 2002, pertemuan yang dilangsungkan di Phnom Penh, Kamboja, para pemimpin ASEAN dan China menandatangani kerangka kesepakatan kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan Republik rakyat China (*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and The people's Republic of China*).<sup>27</sup> Secara keseluruhan kerangka kerjasama ini mengikat komitmen dari ASEAN dan China untuk memperkuat kerjasama ekonomi diantara kedua belah pihak. ASEAN dan China menyetujui dibentuknya ACFTA dalam dua tahapan waktu yaitu, tahun 2010 dengan negara pendiri ASEAN, yang meliputi Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Filipina, dan pada tahun 2015 dengan kelima Negara anggota baru ASEAN yaitu, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Kesepakatan tersebut ditandatangani Perdana Menteri China Zhu Rongji dengan para pemimpin ASEAN. Isi yang tercantum dalam kesepakatan tersebut antara lain :

1. Membangun kawasan perdagangan bebas dalam jangka waktu sepuluh tahun berupa penghapusan tarif dan hambatan-hambatan lainnya.

---

<sup>27</sup> Danil Pambudi dan Alexander C. Chandra, *Garuda Terbelit Naga : Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-China Terhadap Perekonomian Indonesia*, Institute Global For Justice, Jakarta, 2006, Hal 29.

2. Perundingan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dengan potensi pasar sebanyak 1,7 milyar penduduk dan nilai produk domestik bruto antara US\$ 1,5 trilyun US\$ 2 trilyun. Keputusan ini akan dimulai pada 1 juli 2003 bersamaan dengan pelaksanaan perdagangan bebas (AFTA).
3. Menyetakati kerangka perjanjian kerjasama ekonomi komperehensif, dimana untuk senior ASEAN yaitu, Indonesia, Malaysia, Filifina, Thailand dan Singapura, pasar bebas akan mulai berlaku pada tahun 2010. Sementara untuk negara anggota ASEAN lainnya, yaitu Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar mulai berlaku 2015.
4. ASEAN dan China akan mengurangi hambatan tarif dan non tarif secara progresif terhadap perdagangan barang sementara secara bebas bersamaan untuk melangkah pada upaya perdagangan bebas bagi produk jasa.
5. ASEAN dan China sepakat membangun rezim investasi yang terbuka dan komperehensif, yang didukung prosedur imigrasi yang lebih mudah. China akan memberikan perlakuan tarif yang menguntungkan bagi tiga negara miskin ASEAN yaitu, Kamboja, Laos, dan Myanmar.
6. ASEAN dan China sepakat untuk mempererat kerjasama di lima sektor prioritas yaitu, pertanian, teknologi, komunikasi, informasi, pengembangan sumber daya manusia, investasi dan pembangunan sepanjang sungai Mekong.

7. Dalam jangka waktu 10 tahun bagi terwujudnya perdagangan bebas ASEAN-China, China menawarkan lebih awal sektor-sektor pertanian tertentu. Paket ini akan dilaksanakan pada tahun 2004.
8. Penyelenggaraan KTT Sub-regional pertama negara-negara sekitar sungai Mekong (Great Mekhong Sub-regional) di antara Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand, serta provinsi Yunan di China Selatan dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan perkembangan dikawasan ini.
9. ASEAN-China sepakat untuk mengeksplorasi bidang-bidang baru serta mengembangkan langkah-langkah peningkatan kerjasama untuk memfasilitasi integrasi anggota-anggota ASEAN baru, yaitu Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Laos untuk menjembatangi ketertinggalan negara-negara tersebut.

Kerangka persetujuan *Comprehensive Economic Cooperation* berisi tiga elemen yaitu liberalisasi, fasilitas, dan kerjasama ekonomi.<sup>28</sup> Ketiga elemen tersebut terlihat secara umum dalam perjanjian kerjasama ekonomi antara ASEAN dan China tersebut. Dan jika dilihat secara khusus, terdapat enam komponen penting dalam kerangka kesepakatan atas kerjasama ekonomi menyeluruh antara ASEAN dan china termasuk :<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Vica Herawati, *Analisis pengaruh ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) Terhadap Kinerja Keuangan Yang Dilihat Dari Penjualan Pada UKM Tekstil Di pekalongan*, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2010.

<sup>29</sup> Daniel Pembudi dan Alexander C. Chandra, hal 54-55.



1. Perdagangan dan langkah-langkah fasilitasnya (meliputi berbagai isu seperti penghapusan hambatan-hambatan non tarif, adanya kesepakatan mengenai standar dan penilaian prosedur sektor jasa).
2. Bantuan teknis dan pengembangan kapasitas bagi negara-negara anggota ASEAN yang baru termasuk Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV).
3. Adanya langkah-langkah promosi perdagangan yang konsisten dengan peraturan-peraturan dalam WTO.
4. Perluasan kerjasama dalam bidang keuangan, pariwisata, pertanian, pengembangan sumber daya manusia, dan hak kekayaan intelektual.
5. Pembentukan kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) dalam jangka waktu sepuluh tahun, dan diberikannya perlakuan khusus terhadap negara-negara CLMV (ASEAN 6, termasuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, diharapkan dapat menyelesaikan proses penurunan tarif mereka pada tahun 2010. Sementara itu, negara-negara CLMV diberikan lima tahun tambahan, atau hingga 2015, untuk melakukan hal serupa).
6. Pembentukan lembaga-lembaga yang tepat antara ASEAN dan China untuk melaksanakan kerangka kerjasama di antara kedua belah pihak.

Dalam penandatanganan kerangka kesepakatan kerjasama ekonomi ASEAN-China ini terdapat beberapa tujuan yaitu :<sup>30</sup>

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota.
2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa menciptakan suatu sistem yang transparan untuk mempermudah investasi.
3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota.
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara negara-negara anggota.

Pada pertemuan ASEAN-China di Nusa Dua Bali pada bulan Oktober tahun 2003, dimana telah dijalin kemitraan yang strategis untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran bersama. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis untuk Perdamaian dan Kemakmuran (*Declaration on Strategic Partnership for Peace and*

---

<sup>30</sup> Direktorat kerjasama Regional, Ditjen Kerjasama perdagangan Internasional, ASEAN-China Free Trade Area, Jakarta, 2010, hal.2

*Prosperity*) oleh Perdana Menteri China Wen Jiabao dengan 10 negara anggota ASEAN. Dalam deklarasi itu disebutkan :

1. Bidang Politik, akan memperdalam pemahaman serta persahabatan antara rakyat ASEAN dan China, kedua pihak akan memainkan peran dialog dan mekanisme konsultasi pada berbagai tingkatan.
2. Bidang Ekonomi, penguatan pasar dan jaminan momentum pertumbuhan yang berjalan pesat pada hubungan ekonomi perdagangan ASEAN-China.

Selanjutnya ASEAN-China *Free Trade Zone* menjadi tulang punggung kerjasama keduanya menuju 2010 yang kerjasamanya disepakati di Vientiane, Laos pada bulan November tahun 2004.

### **C. China Sebagai Pelaksana Dalam Kerjasama ACFTA**

Kerjasama ASEAN dan China merupakan suatu perkembangan yang besar karena kedua wilayah tersebut mencakup populasi penduduk sejumlah 1,7 miliar dengan GDP gabungan sebesar 2 triliun dolar AS. China merupakan mitra terbesar ke-6 bagi ASEAN di bidang perdagangan dengan volume perdagangan sebesar 5 persen dari total perdagangan ASEAN. Sedangkan ASEAN merupakan mitra dagang terbesar ke-5 bagi China. Para pejabat ASEAN berharap China dapat menjadi importir utama bagi produk-produk ASEAN. Mantan Sekjen ASEAN Rodolfo Severino menyatakan bahwa ASEAN-China FTA akan memberikan dampak secara keseluruhan bagi kedua

belah pihak. Apabila liberalisasi perdagangan atas barang dan jasa yang direncanakan dapat terwujud pada tahun 2012, maka wilayah ini akan merupakan kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia dengan perkiraan total perdagangan sebesar 1,23 triliun dolar AS.<sup>31</sup> Penghapusan hambatan perdagangan antara ASEAN dan China sebagaimana yang diusulkan akan mampu menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi ekonomi FTA serta mendorong ke arah spesialisasi produk yang lebih besar berdasarkan atas keuntungan komparatif. Kegiatan perdagangan akan timbul apabila beberapa produk domestik dari salah satu anggota FTA digantikan oleh produk impor yang lebih murah dari anggota FTA lainnya. Hal ini akan menimbulkan pendapatan nyata dari kedua kawasan pada saat sumber daya mengalir ke sektor-sektor di mana mereka dapat digunakan secara lebih efisien dan produktif.

Terdapat tiga tahapan pengurangan tarif, dengan skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) yaitu :<sup>32</sup>

1. Early Harvest Programme (EHP)

Early Harvest Programme (EHP) adalah suatu program untuk mempercepat implementasi ACFTA dimana tarif *Most Favored Nation* (MFN) sudah dapat dihapus untuk beberapa kategori komoditas tertentu. MFN adalah status yang diberikan kepada suatu

---

<sup>31</sup> Mohamed Aslam, "Impact of ASEAN-China FTA on ASEAN Economies", The Indonesian Quaterly, 2003, hal 332.

<sup>32</sup> www.map.ugm.ac.id. "ACFTA dan Indonesia". akses 11 Desember 2012

negara oleh negara lain dalam suatu hubungan perdagangan. Status ini memberikan kepada suatu negara keuntungan dalam perlakuan perdagangan dalam bentuk misalnya, tarif rendah atau kuota impor yang lebih tinggi. Negara dengan status MFN harus memperoleh perlakuan dagang yang sama dari negara pemberi status. *The Technical Committee-Tariff and Related Matters* (TC-TRM) membentuk EHP pada tahun 2003. Program ini meliputi pembebasan perdagangan daging, ikan, produk susu dan produk ternak lain, pohon hidup, sayuran, buah dan kacang dari semua bea masuk. Terdapat tiga kategori pengurangan dan penghapusan bea masuk. Yaitu Negara yang mengenakan tarif diatas 15 persen, negara dengan tarif antara 5-10 persen dan negara dengan bea masuk dibawah 5 persen. Terhitung sejak Juli 2003, dalam 3 tahun bea masuk untuk semua komoditas itu harus nol. Dengan demikian, pada tahun 2006 enam anggota maju ASEAN (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippina, Singapura and Thailand) sudah harus menghilangkan seluruh tarif pada komoditas yang disebutkan diatas. Namun beras dan minyak sawit tidak termasuk dalam perjanjian ini. Adapun modalitas penurunan tarif untuk EHP adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Modalitas Penurunan Tarif EHP**

Product Category	Existing MFN Tariff Rates (X)	Tariff Rates		
		1 Januari 2004	1 Januari 2005	1 Januari 2006
1	$X > 15\%$	10%	5%	0%
2	$5\% \leq X \leq 15\%$	5%	0%	0%
3	$X < 5\%$	0%	0%	0%

## 2. Normal Track

Sementara dalam kategori komoditas yang masuk dalam normal track, tarif MFN-nya harus dihapus berdasarkan jadwal yang disepakati. Hampir seluruh komoditas masuk dalam kategori ini, kecuali dimintakan pengecualian. Dengan pengecualian tersebut maka selanjutnya akan masuk kedalam sensitive track. Penjadwalannya adalah

- seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 40% komoditas yang ada pada normal track sebelum tanggal 1 Juli 2006.
- Seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 60% komoditas yang ada pada normal track sebelum tanggal 1 Januari 2007.

- Dan seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 100% komoditas yang ada pada normal track sebelum tanggal 1 Januari 2010. Maksimum sebanyak 150 tarif dapat diajukan penundaan hingga tanggal 1 Januari 2012.

**Tabel 4.2**  
**Jadwal Penurunan atau Penghapusan Tarif Pada Normal Track**  
**antara ASEAN dan China**

X = Tingkat Tarif MFN yang berlaku	Tingkat Tarif Preferensial Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (tidak melampaui 1 Januari 2010)			
	2005	2007	2009	2010
$X \geq 20\%$	20	12	5	0
$15\% \leq x < 20\%$	15	8	5	0
$10\% \leq x < 15\%$	10	8	5	0
$5\% \leq x < 10\%$	5	5	0	0
$x < 5\%$	Tetap		0	0

Sumber : Kementerian Republik Indonesia, 2010, *Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN Dengan Mitra Wicara*, Jakarta : Kementerian Republik Indonesia, hal.7.

3. Sensitive Track yang meliputi Sensitive List dan Highly Sensitive List.

Selanjutnya dalam kategori sensitive track dibagi menjadi dua bagian diantaranya adalah sensitive list dan highly sensitive list. Tarif komoditas yang terdapat dalam sensitive list sudah harus dikurangi hingga 20% sebelum tanggal 1 Januari 2012 dan menjadi 0-5%

sebelum tanggal 1 Januari 2018. Sedangkan tarif komoditas highly sensitive list sudah harus dikurangi tidak melebihi 50% sebelum tanggal 1 Januari 2015.

Perdagangan Luar negeri merupakan faktor pendorong utama dari perkembangan ekonomi China dan negara-negara ASEAN. Namun demikian ASEAN lebih tergantung kepada sektor ekspor China. Dengan kenyataan tersebut jelas bahwa China berada di pihak yang lebih diuntungkan dengan adanya ASEAN-China FTA karena eksportnya lebih besar dibandingkan dengan ekspor ASEAN ke China. Lagi pula dari sudut pandang perdagangan internasional, terdapat persaingan yang ketat antara China dan ASEAN terutama dalam aspek persaingan dalam produk.<sup>33</sup> Persaingan perdagangan antara China dan ASEAN menunjukkan bahwa, negara-negara ASEAN sangat khawatir dengan rendahnya ongkos produksi di China dan kemungkinan meningkatnya efisiensi setelah bergabung dalam WTO, pasar domestik mereka akan dibanjiri barang-barang murah produksi China dan mereka tidak akan mampu bersaing dengan produk China dipasar lainnya.

Pertumbuhan ekonomi China telah mendatangkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam perdagangan bilateral China-ASEAN, serta pasar yang akan semakin berkembang bagi produk-produk ASEAN. Tabel-1 menunjukkan kenaikan yang mengejutkan dalam perdagangan bilateral, termasuk kenaikan 400 persen dalam total perdagangan antara tahun 1997 dan

---

<sup>33</sup> "China-Peaceful Rise in Light and Shadow", East Asian Strategic Review, 2005, hal 104.



2004. Meskipun perdagangan bilateral diawali dalam jumlah yang sangat rendah, yakni sebesar 7.28 miliar dolar AS pada 1990, dan hanya meliputi sebagian kecil dari total perdagangan China, namun kenaikan perdagangan bilateral itu telah meningkatkan bahwa pertumbuhan ekonomi China dapat membantu mendorong pertumbuhan perekonomian ASEAN. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan total perdagangan ASEAN-China pada tahun 1997 – 2004 :

**Tabel 4.3**  
**Perkembangan Total Perdagangan ASEAN-China tahun 1997-2004**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Total Perdagangan dalam \$US bn	25.1	23.6	27.2	39.4	41.8	54.8	78.2	105.9
Kenaiikan dalam (%)	(-5.9)	(15.3)	(44.9)	(6.1)	(31.1)	(42.7)	(35.4)	
China Total Perdgn Kerjasama dengan ASEAN-10(%)	7.7	7.3	7.5	8.3	8.2	8.8	9.2	9.2

Sumber : International Monetary Fund, *Direction of Trade Statistic Yearbook*, 2005.

Hubungan ekonomi ASEAN-China dari perdagangan bilateral, mencapai 20,8 persen per tahun dari 1990-2003. Di tahun 2001 angka itu adalah 30 persen, sedangkan di tahun 2003 ia mencapai 78,3 miliar dolar AS, suatu peningkatan sebesar 42,9 persen dari tahun sebelumnya. Di tahun 2004 angka itu meningkat lagi melebihi 105,9 miliar dolar AS dengan angka pertumbuhan sebesar 40 persen. ASEAN menjadi salah satu mitra dagang terbesar di China, dan begitu juga sebaliknya. Pangsa pasar China dalam total

perdagangan ASEAN tumbuh dari 2,1 persen di 1994 menjadi 7 persen di tahun 2003.<sup>34</sup>

Pertumbuhan yang terjadi terhadap perekonomian China telah mendatangkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam perdagangan bilateral China dan ASEAN, serta bisa menghasilkan pasar yang akan semakin berkembang bagi produk-produk ASEAN. Tabel berikut ini menunjukkan perdagangan negara-negara ASEAN dan China pada tahun 2004-2008 :

**Tabel 4.4**  
**Perdagangan Negara-Negara ASEAN dan China Tahun 2004-2008**

Nama Negara	2004	2005	2006	2007	2008
Brunei Darussalam	243	234	174	201	0
Kamboja	12	15	13	11	13
Indonesia	4,605	6,662	8,344	8,897	11,637
Laos	1	4	1	35	15
Malaysia	8,634	9,465	11,391	15,443	18,422
Myanmar	75	119	133	475	499
Filipina	2,653	4,077	4,628	5,750	5,467
Singapura	15,321	19,770	26,472	28,925	29,082
Thailand	7,098	9,083	10,840	14,873	15,931
Vietnam	2,711	2,828	3,015	3,336	4,491
<b>ASEAN Export</b>	<b>41,352</b>	<b>52,258</b>	<b>65,010</b>	<b>77,945</b>	<b>85,558</b>
Brunei Darussalam	87	94	120	157	171

<sup>34</sup> Raul L. Cordenillo, *The Economic Benefits to ASEAN of the ASEAN-China Free Trade Area*, 2005, hal 45.

Kamboja	337	430	516	653	933
Indonesia	4,101	5,843	6,637	8,616	15,247
Laos	89	185	23	43	131
Malaysia	11,353	14,361	15,543	18,897	18,646
Myanmar	351	286	397	564	671
Filipina	2,659	2,973	3,647	4,001	4,250
Singapura	16,137	20,527	27,185	31,908	31,583
Thailand	8,183	11,116	13,578	16,184	19,936
Vietnam	4,416	5,322	7,306	12,148	15,545
<b>ASEAN Import</b>	<b>47,714</b>	<b>61,136</b>	<b>74,951</b>	<b>93,173</b>	<b>107,114</b>

(Nilai dalam juta US\$)

Sumber : ASEAN Trade Statistic Database (july 2009)

Tabel-2 menunjukkan total perdagangan antara China dan ASEAN mengalami defisit bagi ASEAN dengan nilai impor yang lebih besar disbanding ekspor ASEAN ke China sepanjang kurun waktu 2004-2008. Deficit perdagangan tersebut semakin membesar dari tahun ke tahun, dari sekitar 6 miliar dampai mencapai 22 miliar dolar AS pada 2008. Hal ini memperlihatkan ketidakseimbangan potensi dalam berbagai bidang. Dari proses penyusunan dan penandatanganan perjanjian kerjasama ASEAN-China, tampaknya China lebih bersemangat dan berharap mendapat keuntungan dari perjanjian tersebut. Dari kenyataan yang terjadi terkesan bahwa ASEAN lebih bernilai strategis bagi China dibandingkan dengan nilai strategis China bagi ASEAN. Namun persaingan dalam menarik modal merupakan kecemasan bagi negara-negara ASEAN, karena daya tarik China jelas jauh lebih kuat bagi investor asing.

Namun demikian, ekspor dari negara-negara ASEAN Plus Three sangat dibutuhkan oleh China bagi keperluan industri-industri di China. Sedangkan barang-barang yang diimpor dari China ternyata juga sangat laku apabila dipasarkan di kawasan ASEAN, karena harganya jauh lebih terjangkau. Selain itu, perdagangan dengan China ikut pula menambah gairah perekonomian pada masing-masing negara. Terutama dalam ekspor bahan baku industri yang sangat dibutuhkan oleh China. Hasil dari ekspor tersebut ternyata cukup besar dan mampu menambah devisa negara dengan cukup signifikan.

Awal tahun 2010 dimulai dengan pemberlakuan ACFTA atau *ASEAN-China Free trade Area*. Pro dan kontra mengenai pemberlakuan ACFTA marak diperbincangkan. Sebagian masyarakat menganggap ACFTA sebagai tantangan bagi negara-negara ASEAN untuk maju, namun sebagian lainnya menganggap ACFTA sebagai suatu kerugian besar bagi industri-industri dalam negeri. ACFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan china untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambata-hambatan perdagangan barang baik tarif maupun non tarif. Peningkatan akses kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.

Dilakukannya kerjasama ASEAN-China FTA ini adalah untuk membantu kesiapan para anggota ASEAN Plus Three dalam menghadapi perdagangan bebas (*Free Trade Area*) tahun 2020 bagi negara berkembang,

dan tahun 2010 bagi negara maju. Diharapkan negara-negara ASEAN Plus Three akan memiliki kesiapan untuk mengikuti pasar bebas di lingkungan yang lebih luas, sehingga tidak akan ada lagi protes baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dalam suatu negara anggota ASEAN Plus Three. Karena hanya dengan persiapan sarana dan prasarana ekonomi yang baik maka suatu negara tidak akan mengalami kesulitan dalam menghadapi pasar bebas nantinya. Lewat keanggotaannya dalam ASEAN Plus Three ini, dimana China mengadakan berbagai perjanjian dalam kaitannya dengan persiapan pasar bebas, memberikan keuntungan bagi China untuk dapat lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi globalisasi serta perdagangan bebas. Kesiapan ini diperoleh lewat usaha-usaha kerjasama yang dilakukan antara negara-negara ASEAN Plus Three, termasuk China, untuk melakukan intitusionalisasi pasar bebas di kawasan Asia Timur. Sehingga dalam hal ini bukan hanya negara-negara Asia Tenggara maupun negara-negara Asia Timur lainnya yang diuntungkan dan lebih siap menghadapi liberalisasi perdagangan, tetapi China juga menjadi lebih siap dan lebih mantap dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dengan adanya kerjasama ekonomi antara China dengan negara-negara ASEAN Plus Three khususnya dalam kerjasama ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), maka kegiatan perekonomian dari China ke negara-negara ASEAN dapat lebih terlembaga dengan baik. Pelembagaan hubungan kerjasama tersebut juga berarti bahwa seharusnya China akan dapat lebih berperan dalam pembangunan kawasan Asia Timur yang mencakup negara-negara ASEAN Plus Three.